

Analisis Kebijakan PPDB dalam Perspektif Pemerataan Pendidikan, Isu Implementasi, dan Keterkaitannya dengan Pendidikan Karakter

Lalu Wirasantana¹, Winengan², Hadi Kusuma Ningrat³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

¹ laluwirasantana77@gmail.com, ² winengan@uinmataram.ac.id, ³ hadiknt@uinmataram.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-03-2026

Disetujui: 30-04-2026

Kata Kunci:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
Pemerataan Pendidikan;
Implementasi Kebijakan;
Pendidikan Karakter.

Keywords:

New Student Enrollment (PPDB);
Equitable Education;
Policy Implementation;
Character Education.

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia dalam perspektif pemerataan pendidikan, isu implementasi, dan keterkaitannya dengan pendidikan karakter. Penelitian menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan sumber literatur dari *Scopus*, *Directory of Open Access Journals*, dan *Google Scholar*, terbatas pada artikel ilmiah sepuluh tahun terakhir. Proses kajian dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan sintesis terhadap penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi secara konseptual mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi belum sepenuhnya menjamin pemerataan mutu. Kendala utama terletak pada interaksi antara ketimpangan akses, disparitas kualitas institusional, serta lemahnya mekanisme verifikasi dalam PPDB daring dan jalur prestasi. Selain itu, praktik manipulasi data domisili, ketidakjujuran akademik, dan rendahnya integritas seleksi menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum terinternalisasi secara optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi PPDB yang tidak hanya berorientasi pada akses administratif, tetapi juga pada pemerataan mutu, tata kelola transparan, dan penguatan nilai karakter.

Abstract: This study aims to analyze Indonesia's student admission policy Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) from the perspectives of educational equity, implementation issues, and its relationship with character education. The study employs a *Systematic Literature Review* (SLR) using literature from *Scopus*, *Directory of Open Access Journals*, and *Google Scholar*, limited to scholarly publications from the last ten years. The review was conducted through systematic identification, selection, and synthesis of relevant studies. The findings indicate that, conceptually, the zoning-based PPDB policy supports more equitable educational access, yet it has not fully ensured equality in educational quality. The major constraints lie in the interaction between unequal access, disparities in institutional quality, and weak verification mechanisms in online-based PPDB and achievement-based admission pathways. In addition, domicile data manipulation, academic dishonesty, and low integrity in selection processes suggest that character education has not been optimally internalized. This study highlights the need for PPDB reform that goes beyond administrative access and emphasizes educational quality, transparent governance, and stronger character values.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang semakin kompleks sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Ali, 2025). Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik yang mencakup nilai moral, integritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial (Utamirohmahsari, 2024). Sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan berperan dalam mengembangkan kemampuan sekaligus membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga dari keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang tercermin dalam perilaku peserta didik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan (Damayanti & Hanani, 2025). Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah serta menghapus stigma sekolah "*favorit*" dan "*nonfavorit*" yang selama ini menciptakan ketimpangan kualitas (Ranimah, 2026). Secara konseptual, sistem zonasi memungkinkan peserta didik memperoleh akses pendidikan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga efisiensi dan pemerataan dapat tercapai. Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti manipulasi data domisili, ketidakseimbangan daya tampung sekolah, serta kendala teknis dalam sistem pendaftaran daring. Lemahnya pengawasan membuka ruang terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut secara berulang (Afisako & Sari, 2025).

Permasalahan pendidikan juga berkaitan erat dengan kualitas karakter peserta didik yang menunjukkan kecenderungan belum optimal (Nurhamidah, 2018). Fenomena meningkatnya kasus *bullying*, *cyberbullying*, serta rendahnya integritas akademik mencerminkan bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pembelajaran (Syarif, 2025). Pendidikan karakter mencakup tiga dimensi utama yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral yang harus terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa (Setiawan, A., Handayani, A., & Rahmawati, 2024). Pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi digital yang tidak terkontrol turut memperkuat degradasi nilai di kalangan remaja (Yasir, M., Ferdian, N., & Lestari, 2025). Kurangnya pengawasan orang tua serta minimnya keteladanan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu, termasuk analisis bibliometrik terhadap 18 artikel periode 2018–2025, Apriliansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa 78% studi menyatakan kebijakan zonasi berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan, namun 89% juga melaporkan disparitas kualitas sekolah sebagai tantangan utama, sehingga menegaskan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi berkontribusi terhadap pemerataan akses meskipun implementasinya masih menghadapi kendala structural. Apriliansyaz et al. (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah menjadi faktor yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Pertiwi, (2020) laporan pengawasan menunjukkan adanya praktik maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB di berbagai daerah. Penelitian lain Dwiyanita et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh integrasi nilai dalam pembelajaran dan keteladanan pada pendidik. Styawan (2025) perkembangan moral menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk integritas peserta didik

Kajian mengenai kebijakan PPDB dan pendidikan karakter masih cenderung dilakukan secara parsial dan belum mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Permasalahan dalam implementasi PPDB tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai integritas yang menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter. Keterkaitan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam untuk memahami hubungan antara kebijakan pemerataan akses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPDB dan pendidikan karakter secara terpadu dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat integritas sistem pendidikan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan menuju proyeksi tahun 2026.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis serta merumuskan konstruksi konseptual terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pendidikan karakter dalam upaya mewujudkan pemerataan serta integritas pendidikan. Prosedur penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, meliputi perumusan pertanyaan penelitian, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, penelusuran literatur, seleksi dan ekstraksi data, serta sintesis dan penarikan kesimpulan. Tahap awal difokuskan pada identifikasi isu-isu utama terkait implementasi kebijakan PPDB, peran pendidikan karakter dalam sistem pendidikan, serta keterkaitannya dengan prinsip pemerataan akses dan integritas pendidikan. Pertanyaan penelitian dirancang untuk mengarahkan analisis pada karakteristik kebijakan PPDB, bentuk implementasi pendidikan karakter, serta dimensi pemerataan

(akses, kualitas, dan keadilan) dan integritas (nilai, etika, dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pendidikan. Tahapan proses penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Penelitian

Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang secara eksplisit membahas kebijakan PPDB dan/atau pendidikan karakter dalam konteks pemerataan dan integritas pendidikan yang diterbitkan pada rentang tahun 2016 hingga 2025. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi publikasi non-akademik, penelitian yang tidak memiliki kejelasan metodologis, serta artikel yang tidak relevan secara langsung dengan kebijakan pendidikan atau aspek pemerataan dan integritas. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data bereputasi seperti *Scopus*, *DOAJ*, dan *Google Scholar* dengan menggunakan kombinasi kata kunci, antara lain kebijakan PPDB, pendidikan karakter, pemerataan pendidikan, integritas pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul, penelaahan abstrak, serta analisis teks penuh.

Ekstraksi data difokuskan pada identifikasi bentuk kebijakan PPDB, strategi implementasi pendidikan karakter, konteks penelitian, pendekatan metodologis, serta temuan empiris terkait dampaknya terhadap pemerataan dan integritas pendidikan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik thematic coding dan sintesis naratif untuk menghasilkan pemetaan komprehensif mengenai tren penelitian, pola kebijakan, serta kesenjangan konseptual. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kerangka konseptual yang integratif dan berbasis bukti terkait optimalisasi kebijakan PPDB dan pendidikan karakter dalam mewujudkan pemerataan serta integritas pendidikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah sistematis terhadap literatur yang relevan, penelitian-penelitian mengenai implementasi kebijakan PPDB di Indonesia menunjukkan kecenderungan tema yang beragam namun saling berkaitan. Secara umum, studi-studi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fokus utama, meliputi pemerataan akses pendidikan, tata kelola implementasi kebijakan, kesiapan infrastruktur digital, disparitas mutu sekolah, integritas proses seleksi, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur

mengenai pola temuan tersebut, Tabel 1 menyajikan pengelompokan hasil-hasil penelitian berdasarkan bidang kajian, penulis yang memiliki fokus sejenis, serta insight atau variabel utama yang muncul dalam masing-masing studi.

Tabel 1. Sintesis Tematik Hasil Penelitian tentang Kebijakan PPDB di Indonesia

No.	Bidang/ Fokus Kajian	Penulis yang Se-Bidang	Insight/ Variabel Riset
1	Pemerataan Akses dan Keadilan Distributif dalam Kebijakan Zonasi	Melati dan Lodan (2020); Rachmadhany dan Matin (2021); Rabbani, Chotimah, dan Pasha (2023)	Kelompok studi ini menelaah tujuan normatif kebijakan zonasi dalam memperluas akses pendidikan yang lebih adil. Variabel yang dominan meliputi pemerataan akses pendidikan, keadilan distributif, akses siswa lokal, pengurangan dikotomi sekolah favorit, dan inklusi sosial bagi kelompok ekonomi lemah.
2	Implementasi Kebijakan dan Tata Kelola Administratif	Perdana (2019); Sholikah (2023); Prestoroika et al. (2022); Syakira, Putri, Jakrinur, dan Khairan (2025)	Kajian dalam kelompok ini menyoroti persoalan maladministrasi, ketidakjelasan prosedur, inkonsistensi implementasi, tingginya pengaduan masyarakat, adaptasi kebijakan lokal, dan partisipasi publik. Temuan utamanya menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kapasitas tata kelola implementasi.
3	Infrastruktur Digital dan Kendala Sistem Daring	Dewi et al. (2025); Novriyayanti dan Astika (2020)	Fokus utama kajian ini adalah gangguan server, keterbatasan jaringan internet, ketimpangan akses perangkat digital, literasi digital masyarakat, dan kesiapan pengguna sistem. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi PPDB berpotensi menciptakan ketidakadilan baru apabila kesiapan infrastruktur tidak merata.
4	Disparitas Regional dan Ketidakseimbangan Daya Tampung Sekolah	Lakoro, Nada, dan Jalaludin (2026); Triwiyanto dan Kusumaningrum (2025); Ningsih dan Upriani (2026)	Studi-studi ini menyoroti kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan, distribusi sekolah yang tidak merata, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, serta ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas sekolah. Temuan menunjukkan adanya hambatan struktural terhadap pemerataan akses pendidikan.

No.	Bidang/ Fokus Kajian	Penulis yang Se-Bidang	Insight/ Variabel Riset
5	Kesenjangan Mutu Sekolah dan Stratifikasi Sosial Pendidikan	Fatimah (2025); Meritasari et al. (2024); Winarti et al. (2023)	Kajian ini menekankan perbedaan fasilitas sekolah, kualitas guru, budaya akademik, serta tetap kuatnya persepsi tentang “sekolah unggulan”. Literatur menunjukkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya mampu menghapus stratifikasi sosial pendidikan akibat disparitas mutu antar sekolah.
6	Integritas Seleksi, Verifikasi, dan Ketidakhujuran Akademik	Bakti, Pratiwi, Marpaung, dan Siregar (2025); Wahyuningsih et al. (2022); Shaquila et al. (2024); Idris et al. (2026)	Tema utama pada kelompok ini meliputi manipulasi nilai rapor, pemalsuan sertifikat prestasi, lemahnya sistem verifikasi, kurangnya transparansi seleksi, legitimasi hasil seleksi, dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan menunjukkan bahwa keadilan seleksi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola verifikasi.
7	Manipulasi Data Administratif dalam Jalur Zonasi	Prasetya dan Priyono (2025)	Fokus penelitian ini adalah manipulasi data domisili, perubahan alamat pada Kartu Keluarga, serta lemahnya integrasi data antara administrasi kependudukan dan sistem pendidikan. Temuan mengindikasikan adanya celah administratif dalam proses verifikasi zonasi.
8	Dampak Sosial dan Psikologis Implementasi PPDB	Jena (2026); Fadhil dan Sabic-El-Rayess (2021)	Kajian ini menelaah konflik antara orang tua dan sekolah, tekanan psikologis pada siswa, ketidakpuasan publik, dan potensi segregasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan PPDB tidak hanya administratif, tetapi juga sosial-psikologis.

1. Analisis Kebijakan PPDB dalam Perspektif Pemerataan Pendidikan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia, khususnya melalui sistem zonasi, dirancang untuk memperluas akses pendidikan yang lebih adil dan merata, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls. Kebijakan ini menekankan prioritas penerimaan berdasarkan kedekatan geografis antara peserta didik dan satuan pendidikan, sehingga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Implementasinya menunjukkan

respons yang relatif positif di beberapa daerah, seperti Batam dan Bekasi, yang dinilai berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa lokal (Melati, S. K. S., & Lodan, 2020). Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kebutuhan penyesuaian dengan kondisi lokal, kendala teknis pada sistem berbasis daring, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung efektivitas kebijakan (Syakira et al., 2025). Dari sisi dampak, kebijakan zonasi berkontribusi dalam memperluas akses bagi kelompok ekonomi kurang mampu serta mengurangi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan (Rachmadhany, F., & Matin, 2021). Meskipun demikian, kesenjangan kualitas dan infrastruktur antar sekolah masih menjadi persoalan yang signifikan, sehingga peningkatan akses belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan (Ningsih & Upriani, 2026). Selain itu, kebijakan ini juga memunculkan berbagai perdebatan, di mana sejumlah kritik menekankan bahwa tanpa diimbangi dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tujuan ideal kebijakan belum sepenuhnya tercapai (Rabbani, M., Chotimah, A. N., & Pasha, 2023).

Penerapan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tujuan pemerataan akses dan realitas kualitas pendidikan yang dicapai. Meskipun pemerintah telah berupaya mendorong keadilan akses pendidikan, berbagai temuan menunjukkan masih adanya persoalan berkelanjutan seperti maladministrasi, ketidakjelasan prosedur, serta tingginya tingkat pengaduan masyarakat (Perdana, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah. Secara lebih spesifik, permasalahan dalam implementasi kebijakan ini mencakup adanya indikasi kegagalan sistemik dalam pelaksanaan yang dilaporkan oleh Ombudsman sehingga memicu ketidakpuasan publik (Sholikah, Siti Almaratus, 2023), serta keterbatasan pedoman teknis dan dukungan operasional bagi sekolah yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan (Prestoroika et al., 2022). Tingginya tingkat keluhan publik juga mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas yang dihadapi oleh peserta didik dan orang tua (Fadhil, I., & Sobic-El-Rayess, 2021). Selain itu, disparitas regional turut memperparah kondisi tersebut, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas cenderung lebih baik di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, serta distribusi satuan pendidikan yang belum merata, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, sehingga membatasi peluang akses bagi sebagian peserta didik (Lakoro, N., Nada, L. N., & Jalaludin, 2026). Dengan demikian, meskipun kebijakan zonasi diarahkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, berbagai tantangan implementatif menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan berkualitas secara merata masih menjadi persoalan kompleks yang memerlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif serta penguatan sistem pendukung bagi sekolah dan masyarakat.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi secara konseptual telah berada pada jalur yang tepat dalam mendorong pemerataan akses pendidikan, namun implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan kualitas. Dalam perspektif keadilan distributif, kebijakan ini berhasil memperbaiki aspek equality of access, tetapi belum optimal dalam mencapai equality of quality. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan struktural yang belum terselesaikan, seperti distribusi sumber daya pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta infrastruktur sekolah. Dengan demikian, zonasi lebih berfungsi sebagai instrumen administratif redistribusi peserta didik, bukan sebagai solusi komprehensif terhadap ketimpangan sistem pendidikan. Secara evaluatif, kebijakan PPDB melalui sistem zonasi memiliki kekuatan pada aspek peningkatan akses dan pengurangan eksklusivitas sekolah tertentu. Namun, kelemahannya terletak pada implementasi yang belum konsisten dan kurang didukung oleh kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh. Tingginya keluhan publik dan temuan maladministrasi menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan. Selain itu, tanpa intervensi yang simultan pada peningkatan kualitas sekolah secara merata, kebijakan ini berpotensi hanya memindahkan ketimpangan, bukan menghilangkannya. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan masih bersifat parsial dan kontekstual, bergantung pada kesiapan daerah dan dukungan kebijakan turunan.

2. Isu Teknis, Administratif, Sosial dan Keadilan dalam Implementasi PPDB

Permasalahan implementasi PPDB berbasis zonasi mencakup manipulasi data domisili yang dilakukan melalui perubahan alamat pada Kartu Keluarga atau penggunaan alamat yang tidak sesuai kondisi faktual demi memenuhi persyaratan zonasi, yang mencerminkan lemahnya sistem verifikasi serta belum optimalnya integrasi antara sistem pendidikan dan administrasi kependudukan (Prasetya, M. F., & Priyono, 2025). Ketidakseimbangan daya tampung sekolah menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara jumlah lulusan dan kapasitas sekolah negeri, sehingga kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi akar persoalan berupa disparitas kualitas antar sekolah (Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, 2025). Kendala sistem daring seperti gangguan server, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital masyarakat juga memperlihatkan bahwa kesiapan infrastruktur belum merata (Dewi et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dalam akses layanan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan informasi dalam proses pendaftaran.

Kesenjangan kualitas sekolah masih menjadi persoalan utama meskipun sistem zonasi bertujuan menghapus stigma sekolah favorit, karena perbedaan fasilitas dan kualitas guru tetap mendorong masyarakat mencari sekolah unggulan (Fatimah, 2025). Ketidakjujuran akademik dalam jalur prestasi, seperti manipulasi nilai rapor

dan sertifikat, menunjukkan lemahnya sistem verifikasi serta rendahnya integritas dalam proses seleksi (Bakti et al., 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pendidikan. Dampak sosial dari berbagai permasalahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup munculnya konflik antara orang tua dan pihak sekolah, tekanan psikologis pada siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan, serta potensi segregasi sosial dalam masyarakat (Jena, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan PPDB tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik dalam tata kelola pendidikan. Manipulasi data domisili dapat dipahami sebagai respons rasional masyarakat terhadap ketimpangan kualitas sekolah, sehingga kebijakan zonasi belum sepenuhnya menghilangkan preferensi terhadap sekolah unggulan. Ketidakseimbangan daya tampung dan kesenjangan kualitas menandakan bahwa pemerataan akses belum diiringi pemerataan mutu pendidikan. Kendala sistem daring juga menunjukkan adanya kesenjangan digital yang berdampak pada ketidakadilan akses. Secara evaluatif, implementasi kebijakan masih lemah pada aspek desain dan pelaksanaan, terutama dalam sistem verifikasi yang belum terintegrasi sehingga membuka celah penyimpangan. Selain itu, distribusi sumber daya pendidikan yang belum merata dan lemahnya internalisasi pendidikan karakter memperlihatkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan dan integritas dalam praktik pendidikan.

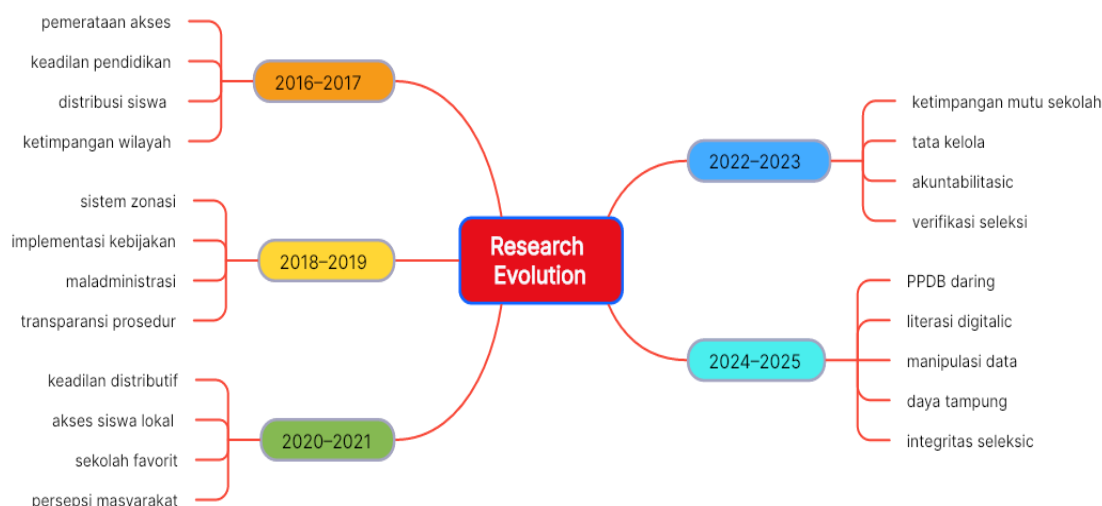
3. Kendala Struktural dan Ketimpangan Akses dalam Implementasi PPDB Daring

Dalam perspektif *systematic literature review* (SLR), temuan-temuan penelitian secara konsisten mengelompok pada tema kendala struktural dalam implementasi PPDB berbasis daring, yang mencakup gangguan server, keterbatasan infrastruktur internet, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Secara empiris, studi oleh Novrijayanti & Astika (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan sarana teknologi dan kesiapan pengguna menjadi hambatan utama efektivitas sistem PPDB daring di tingkat sekolah. Temuan ini beririsan dengan hasil penelitian Meritasari et al. (2024) yang menegaskan bahwa kendala teknis tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan persoalan ketimpangan mutu antar sekolah, di mana institusi dengan sumber daya lebih baik tetap menjadi preferensi utama masyarakat. Lebih lanjut, Winarti et al. (2023) memperlihatkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mampu menghapus persepsi "*sekolah unggulan*", karena disparitas fasilitas, kualitas guru, dan kultur akademik masih sangat nyata. Secara sintesis, konvergensi temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi PPDB tanpa diikuti pemerataan kualitas pendidikan justru berpotensi mereproduksi stratifikasi sosial, sehingga tujuan pemerataan akses pendidikan belum tercapai secara optimal.

Di sisi lain, literatur juga menunjukkan pola temuan yang relatif konsisten terkait lemahnya integritas dan transparansi dalam jalur prestasi PPDB. Wahyuningsih et al. (2022) menekankan bahwa keterbukaan kriteria seleksi dan digitalisasi sistem verifikasi merupakan prasyarat penting untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam seleksi berbasis dokumen akademik maupun non-akademik. Namun demikian, Idris et al. (2026) menunjukkan bahwa praktik manipulasi data dan lemahnya akuntabilitas masih menjadi persoalan mendasar yang mendorong perlunya transformasi sistem seleksi menuju mekanisme yang lebih adaptif dan kredibel. Temuan ini diperkuat oleh Shaquila et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa validitas indikator prestasi sangat menentukan legitimasi hasil seleksi, terutama ketika proses evaluasi tidak didukung oleh standar verifikasi yang kuat. Secara keseluruhan, sintesis ini mengarah pada satu pola utama bahwa persoalan dalam PPDB tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada lemahnya tata kelola verifikasi dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya ketidakjujuran akademik serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan.

Secara interpretatif, temuan-temuan dalam literatur menunjukkan bahwa implementasi PPDB di Indonesia menghadapi dua lapis persoalan yang saling berkaitan, yaitu persoalan struktural dan persoalan tata kelola kelembagaan. Pada dimensi struktural, ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital, keterbatasan literasi teknologi, serta disparitas kualitas pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial menunjukkan bahwa digitalisasi PPDB memang dapat mempercepat proses administratif, tetapi belum otomatis menghasilkan pemerataan akses pendidikan karena ketimpangan sosial yang telah lama mengakar masih tetap berpengaruh. Pada dimensi tata kelola, khususnya pada jalur prestasi, persoalan utama terletak bukan pada sistem daring semata, melainkan pada lemahnya desain verifikasi, pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan. Literatur menegaskan bahwa ketika proses seleksi tidak dibangun di atas standar verifikasi yang transparan, seragam, dan dapat diaudit, ruang bagi manipulasi data tetap terbuka sehingga keadilan prosedural sulit terjamin. Secara kritis, meskipun berbagai studi telah berhasil mengidentifikasi hambatan implementasi tersebut, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan berfokus pada studi kasus lokal, sehingga belum cukup memadai untuk memetakan apakah persoalan yang ditemukan bersifat nasional, regional, atau sangat kontekstual. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung memisahkan persoalan teknis digital dari persoalan mutu sekolah, padahal keduanya saling memperkuat; sekolah dengan kualitas akademik, sumber daya guru, dan fasilitas yang lebih baik umumnya juga memiliki kapasitas digital serta administratif yang lebih kuat, sehingga posisinya dalam kompetisi penerimaan peserta didik semakin dominan. Di sisi lain, pada jalur prestasi, meskipun isu manipulasi dokumen dan lemahnya verifikasi telah diidentifikasi secara konsisten, masih relatif sedikit penelitian yang menguji efektivitas alternatif solusi, seperti

integrasi basis data nasional prestasi siswa, audit digital, maupun interoperabilitas data antarinstansi. Dengan demikian, literatur saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara identifikasi masalah dan pengembangan solusi kebijakan berbasis bukti, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Variabel Penelitian tentang Implementasi Kebijakan PPDB di Indonesia Periode 2016–2025

Secara umum, perkembangan kata-kata kunci dalam penelitian mengenai PPDB di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran fokus kajian yang cukup jelas dari waktu ke waktu. Pada periode 2016–2017, perhatian penelitian masih berpusat pada isu pemerataan akses pendidikan, keadilan pendidikan, distribusi peserta didik, dan ketimpangan wilayah, yang menandakan kuatnya orientasi awal pada perluasan akses layanan pendidikan. Memasuki periode 2018–2019, fokus mulai bergeser pada aspek implementasi kebijakan, terutama terkait sistem zonasi, maladministrasi, dan transparansi prosedur, yang menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap persoalan operasional dan tata kelola kebijakan. Pada periode 2020–2021, penelitian semakin menekankan dimensi keadilan distributif, akses siswa lokal, persepsi masyarakat, dan keberlanjutan stigma sekolah favorit, sehingga kajian tidak lagi hanya menilai akses formal, tetapi juga respons sosial terhadap kebijakan. Selanjutnya, pada periode 2022–2023, muncul perhatian yang lebih kuat terhadap ketimpangan mutu sekolah, tata kelola, akuntabilitas, dan verifikasi seleksi, yang memperlihatkan bahwa isu pemerataan mulai dipahami secara lebih substantif, yakni tidak hanya terkait kesempatan masuk sekolah tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima. Pada periode 2024–2025, perkembangan variabel riset menjadi semakin kompleks dengan menguatnya isu PPDB daring, literasi digital, manipulasi data, daya tampung sekolah, dan integritas seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus penelitian telah bergerak dari persoalan akses administratif menuju persoalan ketimpangan struktural, kapasitas kelembagaan, dan keadilan prosedural. Secara

keseluruhan, evolusi kata-kata kunci tersebut mengindikasikan bahwa penelitian PPDB di Indonesia berkembang dari fokus pada pemerataan akses menuju kajian yang lebih kritis terhadap mutu pendidikan, tata kelola seleksi, serta keberlanjutan keadilan pendidikan secara substantif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi di Indonesia secara konseptual telah mengarah pada upaya pemerataan akses pendidikan yang lebih adil, terutama melalui pengurangan eksklusivitas sekolah tertentu dan perluasan kesempatan bagi peserta didik berdasarkan kedekatan wilayah. Namun demikian, berbagai temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan ini masih bersifat parsial karena peningkatan akses formal belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Ketimpangan kualitas sekolah, distribusi sumber daya pendidikan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur digital, serta lemahnya tata kelola verifikasi dan pengawasan masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam perspektif *systematic literature review* (SLR), persoalan utama PPDB tidak hanya terletak pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada ketidaksiapan kapasitas kelembagaan dan belum teratasinya persoalan struktural dalam sistem pendidikan, sehingga tujuan pemerataan pendidikan yang bersifat substantif masih belum sepenuhnya tercapai.

Di sisi lain, sintesis literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Sebagian besar studi masih bersifat deskriptif, berfokus pada konteks lokal, dan cenderung membahas secara terpisah antara isu digitalisasi layanan, kesenjangan mutu sekolah, serta integritas seleksi. Padahal, ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam membentuk keadilan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian pada masa mendatang perlu diarahkan pada kajian yang lebih integratif dengan menelaah hubungan antara kapasitas infrastruktur digital, disparitas mutu sekolah, perilaku strategis masyarakat, serta efektivitas mekanisme verifikasi dalam PPDB. Selain itu, penelitian komparatif antarwilayah dan studi longitudinal menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan zonasi benar-benar mampu menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, topik riset yang mendesak untuk dikembangkan adalah model evaluasi kebijakan PPDB berbasis bukti yang mengintegrasikan dimensi akses, mutu, dan tata kelola secara simultan agar reformasi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak berhenti pada redistribusi administratif peserta didik, melainkan mampu mendorong keadilan pendidikan yang lebih substantif.

REFERENSI

- Afisako, V. P., & Sari, Z. M. (2025). Model Kerja Sama Antar Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pendidikan untuk Mencegah Maladministrasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Bengkulu. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 285–291.
- Ali, A. R. (2025). Transformasi Pendidikan sebagai Pilar Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, 2(1), 1–12.
- Apriliansyah, F., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Analisis Kesenjangan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Studi Literatur terhadap Perbedaan Akses dan Kualitas antara Sekolah Negeri dan Swasta di Daerah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 753–758.
- Apriliansyah, F., Susanto, T. T. D., & Mayasari, L. I. (2025). Evaluasi Kebijakan PPDB Sistem Domisili dalam Pemerataan Akses Pendidikan: Tinjauan Sistematis Literatur. *Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 3(1), 497–505.
- Bakti, S., Pratiwi, E., Marpaung, D., & Siregar, N. H. A. (2025). Model Heisqual Sebagai Instrumen Deteksi Dini Krisis Integritas Akademik: Tinjauan Literatur Terhadap Kasus Pemalsuan Ijazah di Indonesia. *Kalianda Halok Gagas*, 8(2), 97–106.
- Damayanti, V. S., & Hanani, R. (2025). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (ppdb) sistem zonasi untuk smp negeri di kecamatan tembalang dan kecamatan semarang tengah kota semarang di tinjau dari perspektif public value. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 762–775.
- Dewi, M., Ballianie, N., Astuti, M., Halimatussakdiah, H., Fatimah, S., & Sari, G. P. I. (2025). Tantangan implementasi kurikulum di era digital: Kesiapan guru dan infrastruktur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 10732–10741.
- Dwiyana, E., Azmalasari, D. P., Lestari, W. P., & Nuriyati, T. (2025). Penerapan Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam Yang Efektif Di Lingkungan Sekolah. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 5(2), 134–145.
- Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing equity of access to higher education in Indonesia: A policy evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 3(1), 57–75. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Fatimah, M. N. (2025). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(8), 91–100.
- Idris, F., Humulhaer, S., Subroto, G., Susilawati, A., & Tangerang, U. I. S. (2026). Era Digital Perspektif Tata Kelola Dan Akuntansi. *Berajah Journal*, 6(1), 92–101.
- Jena, B. K. (2026). Capabilities, Constraints and Academic Dishonesty in Higher Education: Sociocultural Influences on Student Behaviour in Odisha. *Contemporary Education Dialogue*, 23(1), 13–39.
- Lakoro, N., Nada, L. N., & Jalaludin, J. (2026). Efektivitas Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas: Tinjauan Literatur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4630–4640.
- Melati, S. K. S., & Lodan, K. T. (2020). Penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada tingkat sekolah menengah atas di kota batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4), 7684.
- Meritasari, D. P. R., Dhulhijjahyani, F., Rahman, A., & Untari, S. (2024). Analisis implementasi dan kualitas pendidikan pada kebijakan zonasi di Kota Blitar. *Journal of Education Research*, 5(2), 2129–2137. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1094>
- Ningsih, F., & Upriani, N. (2026). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

- Baru terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas : Studi Kepustakaan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 425–433.
- Novrijayanti, I., & Astika, Y. W. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(3), 173–184. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i3.31>
- Nurhamidah, I. (2018). Problematika kompetensi pedagogi guru terhadap karakteristik peserta didik. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 3(1), 27–38.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi ppdb zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92.
- Pertiwi, M. P. (2020). Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PPDB Tingkat SMA Tahun 2017-2018. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 1(1), 40–69.
- Prasetya, M. F., & Priyono, E. A. (2025). Transformasi Yuridis Inovasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Social Justice Guna Pemerataan Akses Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Syntax Literate*, 10(8), p6867.
- Prestoroika, E., Siallagan, D. Y., Eko, A., & Sasongko, T. (2022). PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA PONTIANAK. *Pendekar*, 5(3), 211–218.
- Rabbani, M., Chotimah, A. N., & Pasha, J. F. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpati*, 1(3), 204–212.
- Rachmadhany, F., & Matin, M. (2021). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi*, 73(1), 84–98.
- Ranimah, R. (2026). Systematic Literatur Review (SLR): Kebijakan Sistem Zonasi di Indonesia. *Journal Of Pedagogical Perspectives In Education*, 1(3), 297–309.
- Setiawan, A., Handayani, A., & Rahmawati, D. (2024). Implementasi pendidikan karakter terhadap perilaku moral siswa melalui pembelajaran di lingkungan sekolah dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(1), 1949–1962.
- Shaquila, S., Setianingsih, A. I., & Hardi, O. S. (2024). Perbandingan prestasi belajar siswa melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi dengan jalur prestasi di SMA Negeri 30 Jakarta. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 9(1), 74–82. <https://doi.org/10.24815/jpg.v9i1.34594>
- SHOLIKAH, SITI ALMARATUS, M. H. A. (2023). Zonasi pendidikan, pemerataan peserta didik atau peningkatan mutu pendidikan. *An Nuur*, 13(1), 25.
- Styawan, R. (2025). Perkembangan Moral dan Etika Peserta Didik dalam Konteks Pendidikan Karakter. *Inklusi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Filsafat*, 1(2), 41–50.
- Syakira, S., Putri, R. E., Jakrinur, A., & Khairan, M. A. (2025). Dinamika Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Perspektif*, 3(3), 300–309.
- Syarif, N. Q. (2025). Dekadensi moral siswa sekolah: Telaah faktor, dampak, dan solusi pendidikan karakter. *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan Dasar*, 2(2), 19–28.
- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. (2025). Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2).
- Utamirohmahsari, U. (2024). Character education building a generation with integrity and ethics. *IJM (International Journal Multidisciplinary: Economics, Management, Law and Education)*, 1(1), 1–6.
- Wahyuningsih, D., Hamidah, H., Anisah, A., Irawan, D., Rizan, O., & Kirana, C. (2022). Seleksi peserta didik baru dengan metode additive ratio assessment (ARAS). *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 11(1), 120–126. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i1.1381>
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan pemerataan menghadirkan kesenjangan: Analisis dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik

baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3579>

Yasir, M., Ferdian, N., & Lestari, F. W. N. I. (2025). antangan Generasi Muda dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Agama di Tengah Arus Globalisasi: Socialization Program on Challenges Faced by Younger Generation in Preserving Religious Values amidst the Rising Tide of Globalization. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 5(4), 269–278.